

**LAPORAN PELAKSANAAN RESES
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
MASA RESES TANGGAL 10 S/D 17 MEI 2023**

Disampaikan oleh : dr. Hj. Sholeha Kurniawati
Dalam : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah
Hari/Tanggal : 12 Juni 2023

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Yth. Saudara Ketua dan para wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yth. Segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yth. Segenap jajaran eksekutif di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Serta Rekan-rekan wartawan dan segenap tamu undangan yang berbahagia.

Hadirin Peserta Sidang Paripurna yang dikasihi oleh Allah SWT,

Mengawali laporan hasil pelaksanaan reses Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada masa persidangan kedua tahun 2022/2023, perkenankanlah kami mengajak segenap hadirin untuk bersama-sama menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan

rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga, dan sahabatnya, semoga pola kepemimpinannya dapat kita jadikan uswah dalam membangun masa depan masyarakat Jawa Tengah yang lebih baik.

Hadirin Peserta Sidang Paripurna yang terhormat,

Selanjutnya kami sampaikan hasil laporan reses ini yang merupakan kumpulan hasil penyerapan aspirasi anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, sebagai berikut :

1. Alhamdulillah, sebanyak 30 ribu lebih Jama'ah haji asal Jawa Tengah telah diberangkatkan. Semoga jama'ah haji asal Jawa Tengah khususnya dapat meraih predikat haji mabrur. Adanya kenaikan biaya haji disatu sisi memberatkan masyarakat miskin yang telah mendaftar. Karenanya masyarakat berharap hasil pengelolaan dana BPKH dapat digunakan untuk mensubsidi pembiayaan haji dan umroh. Dengan demikian biaya haji dan umroh dapat ditekan dan tidak memberatkan masyarakat kurang mampu. Adanya 3 Jama'ah haji asal Jawa Tengah yang wafat semoga keluarganya diberikan kesabaran dan keikhlasan dan kita doakan semoga para jama'ah haji yang wafat di tanah suci menjadi syuhada dan ditempatkan di surga. Amiin.
2. Adanya isu praktek jual beli jabatan dalam perekrutan perangkat desa mencederai demokrasi dan merusak upaya good governance di tingkat desa . Untuk itu masyarakat berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mendalami masalah tersebut

dan jika terdapat laporan resmi dari masyarakat agar segera di proses sesuai dengan perundangan undangan yang berlaku.

3. Dampak negatif sistem pembelajaran daring di masa pandemi yang lalu adalah saat ini banyak anak-anak yang kecanduan hp untuk melihat contents di youtube, tiktok, game dsb. Untuk itu para orang tua berharap pemerintah provinsi dapat mengeluarkan regulasi agar semua Lembaga Pendidikan melakukan pembelajaran cara penggunaan hp android yang baik dan produktif bagi peningkatan kualitas siswa/siswi.
4. Mahalnya biaya Pendidikan di perguruan tinggi negeri, terutama perguruan tinggi negeri pavorit sangat meresahkan masyarakat kurang mampu. Untuk itu masyarakat berharap pemerintah provinsi dapat menyampaikan keluhan masyarakat agar biaya Pendidikan tidak terlalu mahal sehingga dapat terjangkau keluarga kurang mampu.
5. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah sampah semakin banyak dan mengganggu Kesehatan masyarakat. Inovasi bank sampah menjadi salah satu solusi mengurangi masalah sampah. Karenanya masyarakat berharap pemerintah provinsi membuat program pengelolaan sampah rumah tangga secara massif di seluruh kelurahan dan desa di Jawa Tengah.
6. Masyarakat berharap agar Pemerintah Jawa Tengah melakukan update data induk kemiskinan di desa desa dengan sebaik baiknya, agar masalah bantuan apapun dari pemerintah (baik pusat, provinsi

dan kab/kota) yang seringkali dianggap tidak tepat sasaran dapat diatasi secara tuntas.

7. Jumlah BUMDes di Jawa Tengah meningkat sangat signifikan. Kurang lebih 57.200 BUMDes telah terbentuk di Jawa Tengah. Banyaknya BUMDes harus diimbangi dengan kualitas kinerja agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, dalam hal ini masyarakat desa. BUMDes juga sebaiknya dapat berperan dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat di desa. Jangan sampai justru mematikan ekonomi rakyat yang sudah ada, tetapi BUMDes harus dapat memicu perkembangan usaha usaha di desa
8. Pemerintah Provinsi diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan pelatihan ketrampilan di pedesaan, terutama untuk generasi muda usia produktif agar menjadi penggerak pembangunan desa. Diharapkan usaha ini akan meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran.
9. Masyarakat berharap perlunya membentuk PERDA larangan membuang sampah di sembarang tempat, terutama di saluran air. Karena disamping menjadi penyebab banjir juga dapat menghambat aliran air di area persawahan dan pertanian lainnya.
10. Para petani mengeluhkan persoalan permainan harga hasil panen. Pasalnya, petani menilai biaya tanam yang tinggi dan hasil panen yang didapatkan terlalu rendah sehingga membuat petani merugi. Petani berharap ada intervensi dari pemerintah agar nasib petani bisa lebih baik. Para petani berharap pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap distributor dan agen agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di saat petani membutuhkannya.

Bahkan. Perlu regulasi terkait tata kelola pupuk yang jelas dan berpihak pada rakyat untuk menjamin ketersediaan pupuk pada saat musim tanam tiba dengan harga yang terjangkau.

11. Perlu adanya kejelasan terkait Kartu Tani, yang mana masih ada beberapa masyarakat yang kesulitan mendapatkan subsidi pupuk. Disamping itu perlu adanya pendampingan dan penyuluhan terhadap para kelompok tani dan kelompok ternak.
12. Tidak adanya panduan dalam bercocok tanam bagi para petani di desa menjadi bukti bahwa dinas pertanian tidak bekerja untuk pengembangan sektor pertanian. Untuk itu masyarakat berharap pemerintah provinsi mengkoordinir agar dinas pertanian provinsi dan kab/kota untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada para petani di desa agar hasil pertaniannya berkualitas dan hasil produksinya meningkat.
13. Banyaknya potensi desa wisata di Jawa Tengah belum dieksplorasi dan di support secara baik. Karenanya masyarakat berharap agar pemerintah provinsi dapat mendorong dan membantu pengembangan desa wisata agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa dalam mewujudkan desa mandiri.
14. Banjir adalah peristiwa rutin yang dialami masyarakat di musim hujan, apalagi jika sungai mengalami pendangkalan akibat sampah dan material tanah dan pasir baik dari hulu maupun longsoran bantaran sungai. Begitu juga rob sepanjang tahun yang dialami masyarakat pesisir utara membuat resah dan sedih namun mereka tidak punya pilihan selain bertahan dengan kondisi yang ada. Untuk

itu mereka berharap pemerintah provinsi serius menangani masalah banjir dan rob yang menimpa masyarakat.

15. Pembangunan jalan desa, jalan usaha pertanian, pembangunan drainase, talud desa, pembangunan sarana prasarana pengembangan wisata desa, pembangunan embung desa harus menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam membantu kesejahteraan masyarakat desa.
16. Program RTLH mendapatkan apresiasi dari masyarakat miskin yang rumahnya kurang layak huni, namun program ini banyak yang tidak terealisasi. Untuk itu Pemerintah Provinsi diharapkan melakukan sosialisasi agar program RTLH dapat terealisasi dengan baik.
17. Kerusakan jalan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah disebabkan 4 faktor ; (1) kendaraan angkutan barang yang melebihi tonase, (2) kualitas jalan yang kurang baik, (3) Sikap Pemerintah, (4) faktor alam seperti banjir dan bencana alam. Untuk itu masyarakat berharap saudara Gubernur dapat memberikan sanksi berupa penghentian izin operasi kepada perusahaan bongkar muat (PBM) dan trucking yang angkutan barangnya melebihi tonase, memblacklist kontraktor jalan yang kualitas pekerjaannya buruk dan atau tidak memenuhi standar. Tanpa ketegasan dan sanksi Pemerintah kondisi jalan tidak akan bertahan lama.
18. Banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum reses disatu sisi dan rendahnya tindaklanjut hasil reses oleh Pemerintah Provinsi menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat memandang Pemerintah Provinsi tidak serius dalam

menampung dan menindaklanjuti hasil aspirasinya. Masyarakat sudah tahu kalau APBD Provinsi Jawa Tengah adalah hasil iuran masyarakat Jawa Tengah.

Demikianlah Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. Harapan kami semoga laporan ini dapat dijadikan acuan Gubernur dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua,

Sekretaris,

H. Masruhan Samsurie

dr. Hj. Sholeha Kurniawati